



ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), GRDP AND MINIMUM WAGE ON POVERTY CASE STUDY OF DISTRICTS/CITIES IN WEST JAVA

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

Arifudin¹, Siti Nurhalisa², Riski Faturrohman³, Nur Halizah⁴,
Muhammad Ferris Rayka Denianto⁵

^{1,2,3,5} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Universitas 17 Agustus Cirebon

⁴ Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: arifudin2000@gmail.com¹, sitinurhalisah1410@gmail.com²,
rizkifaturrohman021@gmail.com³, halizahnur885@gmail.com⁴,
ferrisraykadenianto@gmail.com⁵

ARTICLE INFO

Correspondent

Arifudin

arifudin2000@gmail.com

Key words:

Human Development Index,
Gross Regional Domestic
Product, minimum wage,
poverty

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 2152 – 2167

ABSTRACT

Poverty begins to increase over time, so what happens is that poverty will give rise to social and economic problems. The poverty rate in Indonesia is still quite high, including in the West Java region. Efforts to eradicate poverty continue to be made so that people can have a better life. Poverty can be influenced by several factors including the Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Minimum Wage. This research was conducted with guidance to determine the influence of the Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP), and general wages on poverty in district/cities in West Java. The method used in this research is the panel data regression method with data for 2015-2017. The results of this research show that (1) the Human Development Index (HDI) influences the poverty of districts/cities in West Java. (2) Gross Regional Domestic Product (GRDP) is not directed towards Poverty in city districts in West Java (3) Minimum wages influence poverty in district/Cities in West Java.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Arifudin <i>arifudin2000@gmail.com</i> Kata kunci: <i>Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum, kemiskinan</i> Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 2152 – 2167	Kemiskinan mulai meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga yang terjadi pada permasalahan kemiskinan ini akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, termasuk di wilayah Jawa Barat. Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan agar Masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan dapat dipengaruhi beberapa faktor di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan data pada tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat. (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat. (3) Upah Minimum berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Persebaran angka kemiskinan di Indonesia tidak merata, di beberapa provinsi memiliki angka kemiskinan yang rendah, sedangkan di beberapa provinsi lainnya memiliki angka kemiskinan yang tinggi (SK Sangadah, S. K., Laut, L. T., & Jalunggono, G, 2020). Angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan pun sangat berbeda. Yang di mana angka kemiskinan di perdesaan mencapai 16,31 persen, sedangkan angka kemiskinan di perkotaan mencapai 10,27 persen saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan tersebut tinggi (SN Hasibuan, B Juanda, S Mulatsih, 2019).

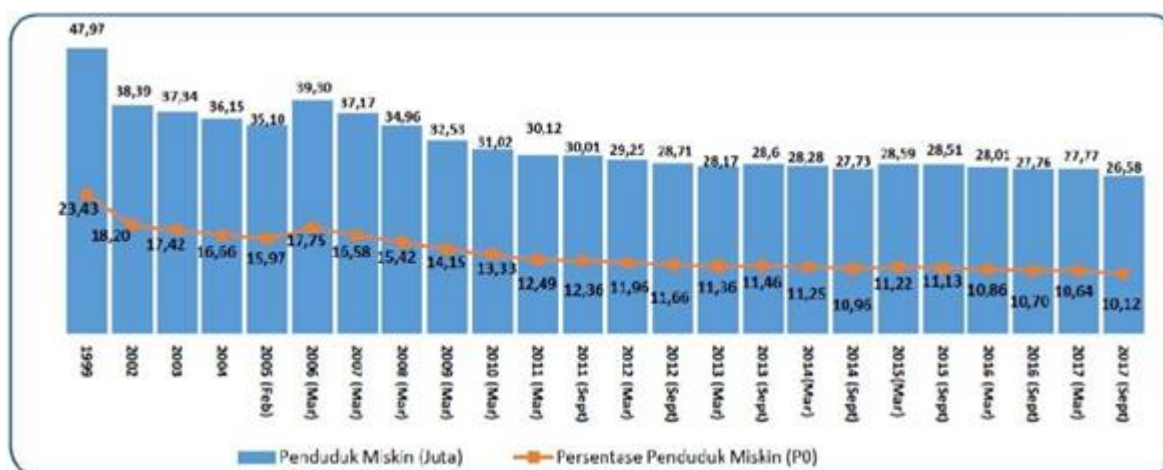
Pada tahun 2008-2012 di Jawa Barat mengalami penurunan angka kemiskinan. Di tahun 2008 persentase kemiskinan sebesar 13,01 persen. Angka tersebut jauh di bawah provinsi lainnya (S. Susanti, 2013). Disisi lain angka kemiskinan provinsi Jawa Barat di tahun 2011 sebesar Rp. 234.622,00 per kapita/bulan atau sebesar Rp. 2.815.464,00 per kapita/tahun (K. Khairunnisa, S. Hartoyo, 2014). Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kemiskinan yang tinggi, dan hal tersebut menyebabkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-2 di Indonesia (K. Berliani, 2021).

Yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pengaruh produktivitas tenaga kerja (E. Marlita, 2017).

Menurut teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah, pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh T.R Malthus, yang menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (1,2,3 dan seterusnya). Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum, kemudian produksi bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat substensi dan perekonomian yang mengalami kemendungan. Ada beberapa pengaruh dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di antaranya yaitu pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan pengangguran (S. Susanti, 2013). Pengaruh lain terhadap kemiskinan yaitu upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Menurut Nazara, Suahasil (2007) bahwa; Pertama, kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan yang tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (*opportunity cost*) jika anak mereka bekerja. Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu.

Secara nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 1999-2017. Berikut data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia:



Gambar 1. Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin Tahun 1999- 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2017

Secara umum, pada periode 1999–September 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase di mana pada tahun 2017 tingkat persentase penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 10,12% dengan jumlah penduduk sekitar 26,58 juta jiwa. Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang terus menurun dari tahun 2007 hingga 2012

mengindikasikan adanya keberhasilan dari beberapa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini pembangunan masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan PDRB yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat khususnya. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor utama dalam permasalahan ini. Kurangnya lapangan kerja, atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang tidak sesuai dan terlalu kecil dapat mengakibatkan pendapatan PDRB ini menurun yang akan berdampak pada angka kemiskinan. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, IPM, UMK, terhadap tingkat Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2015-2017 ini menggunakan data panel, sumber data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan lebih bersifat objektif berdasarkan angka yang dihasilkan kemudian dikaitkan dengan teori yang ada dan terbebas dari pengaruh penilaian subjektif pribadi peneliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan data *cross section* dengan data *time series*.

Populasi penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Pulau Jawa. Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu batasan ruang lingkup dengan tujuan agar subjek, objek dan waktu dari periode tidak melebihi dari tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu sampel dalam penelitian ini yaitu 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 7 kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan PDRB dan upah minimum terhadap kemiskinan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel tidak bebas (*Dependent Variabel*) dan tiga variabel bebas (*Independent Variabel*). *Dependent variabel* adalah tingkat kemiskinan (Y). *Independent variabel* terdiri dari: Indeks pembangunan manusia (X1), PDRB per kapita (X2), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3). Penelitian ini menggunakan wilayah sampel kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dalam jangka waktu 2015-2017.

Penelitian ini merupakan data sekunder yang telah diolah dan dipublikasikan di dalam berita resmi statistik oleh lembaga Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data panel atau gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang terdiri 18 Kabupaten dan 9 Kota dengan runtutan waktu dari tahun 2015-2017. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan masalah yang telah terjadi pada masa lalu maupun masa sekarang atau saat penelitian ini berlangsung.

Terdapat ciri-ciri penelitian deskriptif yaitu terdapat hubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu, dapat menguraikan satu variabel atau beberapa variabel yang diuraikan satu persatu, tidak memanipulasi variabel atau tidak ada perlakuan (Ronny Kountur, 2013).

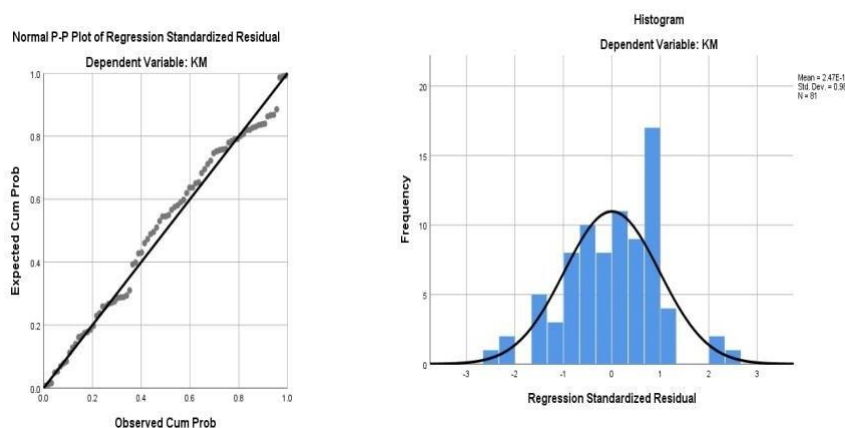
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik dan Interpretasi Data

Untuk melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik nonparametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Maka digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

1. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah regresi berfungsi linear atau tidak. Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait linear atau tidak. Kriteria pengujian linearitas adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait adalah linear (S Syahidin, 2021). Dalam uji linearitas ini menggunakan metode grafik P-P plot dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Linearitas
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan grafik *scatter plot* diatas, terlihat titik-titik *plot* data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel IPM, PDRB dan UMK (X) dengan variabel Kemiskinan (Y). Sehingga dapat disimpulkan uji data yang diteliti ini baik karena linear dan positif.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat hasil probability J-B. Jika nilai probability J-B < dari taraf signifikansi yaitu 0.05 maka data tersebut disimpulkan tidak normal, sebaliknya jika probability J-B > 0.05 maka data yang dimiliki berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24083722
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.064
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh output spss nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,20 lebih besar dari nilai Sig. Yang ditentukan (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa data ini dikatakan normal karena memenuhi syarat normalitas yang telah ditetapkan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model regresi yang terbaik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas yang digunakan uji Jarque-Bera (JB).

Jika nilai probabilitas pada JB test $>0,05$ maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya. Apabila probabilitas JB test $<0,05$ maka variabel-variabel tersebut tidak berdistribusi normal. (Ghazali dan Ratmono, 2013).

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat dan signifikan antara variabel independent, model regresi dikatakan tidak memiliki multikolinearitas bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerancinya lebih dari 1 atau 0,01.

Menurut Gujarati (2006), jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta			Zeroorder	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	24.877	1.824		13.638	.000					
IPM	-4.358	.487	-.715	-8.949	.000	-.789	-.714	-.581	.661	1.512
PDRB	.134	.070	.162	1.915	.059	-.381	.213	.124	.592	1.689
UMK	-.385	.110	-.298	-3.490	.001	-.578	-.370	-.227	.580	1.724

a. Dependent Variable: KM

Hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa nilai VIF variabel IMP <10, yaitu sebesar 1,512 dan nilai tolerance <1 sebesar 0,661 artinya dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas. Pada nilai VIF variabel PDRB <10, yaitu sebesar 1,689 dan nilai tolerance <1 sebesar 0,592 artinya dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas. Pada nilai VIF variabel UMK <10, yaitu sebesar 1,724 dan nilai tolerance <1 sebesar 0,580 artinya dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual setiap variabel dengan menggunakan uji sperman.

Uji ini menggunakan metode uji Glejser dimana jika nilai probability <0.05 maka terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai probability >0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Gujarati, 2006)

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas
Correlations

	IPM	PD R B	UMK	Abs_resi
Abs_r Correlation esi Coefficient	.269*	-.140	.009	1.000
Sig. (2-tailed)	.015	.212	.940	.
N	81	81	81	81

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel lebih dari 0,05 yang dilihat dari tabel Abs-resi bagian Sig (2-tailed) yaitu nilai Sig. IMP sebesar 0,015, nilai Sig. PDRB sebesar 0,212 dan nilai Sig. UMK sebesar 0,940 artinya model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya korelasi antar variabel. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi masalah autokorelasi (Ghazali dan Ratmono, 2013).

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linear berganda adalah dengan Uji Waston (DW), (DNA Janie, 2012).

Kriteria Non Autokorelasi

1. $DW > DU$
2. $(4-DW) > DU$
3. $(4-DW) < DL$
4. $DW < DL$
5. $DU < DW < 4-DU$

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	Age Statistic	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.822 ^a	.675	.662	.24548	.675	53.289	3	.000	.710

a. Predictors: (Constant), UMK, IPM, PDRB

b. Dependent Variable: KM

Dalam penelitian ini kriteria uji autokorelasi yang digunakan adalah pada nomor empat yaitu $DW < DL$, nilai untuk DW dari tabel model summary^b sebesar 0,710 dan nilai untuk DL dari tabel Durbin-Waston yaitu 1,5632. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat permasalahan autokorelasi atau Non Autokorelasi, karena memenuhi kriteria nomor empat yaitu $DW < DL$ atau 0,710 < 1,5632.

6. Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Persamaan Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations Zero-order Partial Part			Collinearity Statistics Tolerance VIF	
	B	Std. Error	Beta							
(Constant)	24.877	1.824		13.638	.000					
IPM	-4.358	.487	-.715	-8.949	.000	-.789	-.714	-.581	.661	1.512
PDRB	.134	.070	.162	1.915	.059	-.381	.213	.124	.592	1.689
UMK	-.385	.110	-.298	-3.490	.001	-.578	-.370	-.227	.580	1.724

a. Dependent Variable: KM

Dalam Tabel 6 menunjukkan arah, nilai koefisien, dan nilai signifikansi dari hasil regresi. Diketahui bahwa nilai signifikansi dari IPM adalah 0,000 nilai signifikansi dari PDRB adalah 0,059 dan nilai signifikansi dari UMK adalah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM dan UMK memiliki pengaruh parsial (H_0 ditolak) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat, untuk variabel PDRB menunjukkan tidak adanya pengaruh parsial (H_0 diterima) terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat.

2. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen, yaitu variabel IPM, PDRB dan UMK memiliki pengaruh simultan secara signifikan terhadap Variabel dependen Kemiskinan. Hal itu dapat terjadi jika Nilai F hitung > F tabel atau jika dilihat dalam tabel nilai signifikansi Uji F < 0,05.

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka dalam pengajuan ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika F-hitung < F tabel, maka H_0 diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen secara signifikan tidak dipengaruhi variabel dependen.
- 2) Jika F-hitung > F tabel, maka H_1 ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Selain dengan cara diatas, uji-F juga dapat dilakukan dengan cara *Quick Look*, yaitu dengan melihat nilai *probability* dan derajat kepercayaan yang ditentukan dalam penelitian atau melihat nilai F- tabel dengan F-hitungnya. Jika nilai *probability* < 0,05 atau $\alpha = 5\%$ yang berarti menolak H_0 dan menerima H_1 dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya dan sebaliknya (Kuncoro, 2003). Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F menurut tabel.

$H_0 : \beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan upah minimum (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap kemiskinan (Y) di kabupaten/kota di Jawa Barat

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan upah minimum (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap kemiskinan (Y) di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kriteria Uji F:

- Jika nilai F hitung < nilai F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression		9.634	3	3.211	53.289	.000 ^b
Residual		4.640	77	.060		
Total		14.274	80			

a. Dependent Variable: KM

b. Predictors: (Constant), UMK, IPM, PDRB

Hasil pada gambar diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$, yaitu sebesar 0,000 yang sesuai dengan pengambilan keputusan Uji F. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Hipotesis 1 H_0 ditolak, yaitu variabel IPM, PDRB dan UMK berpengaruh secara Simultan terhadap variabel Kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat.

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu memberikan arti bahwa variabel independen secara menyeluruh telah menjelaskan dan memberikan informasi pada variabel dependen (Kuncoro 2003).

Analisis koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan dapat mengukur seberapa besar variabel independen dengan menjelaskan perubahan terhadap variabel dependen. Tujuan menggunakan analisis ini agar dapat menghitung besarnya pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan nilai koefisien determinasi yang terletak antara 0 dan juga 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati nol berarti memiliki kemampuan semua variabel independen untuk dapat menjelaskan variabel dependen dengan sangat terbatas. Sedangkan nilai determinasi yang mendekati satu berarti variabel independen yaitu variabel yang memberikan informasi hampir jelas untuk memprediksi variasi variabel terikatnya (Marpaung, 2018).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary ^b										
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson	
1	.822 ^a	.675	.24548	.675	53.289	3	77	.000	.710	

a. Predictors: (Constant), UMK, IPM, PDRB

b. Dependent Variable: KM

Hasil uji menunjukkan bahwa R (Koefisien korelasi) sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara IPM, PDRB dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan sesuai dengan pedoman derajat korelasi.

Tabel 9. Hubungan IPM, PDRB dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

No.	Nilai Korelasi (r)	Tingkat Hubungan
1	0,00 – 0,199	Sangat lemah
2	0,20 – 0,399	Lemah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 0,100	Sangat kuat

Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,675 yang berarti variabel independen, yaitu variabel IPM, PDRB dan Upah Minimum mampu menjelaskan Variabel dependen Kemiskinan sebesar 67,5% dan sisanya sebesar 32,5% dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian.

Pembahasan

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Menurut Henry George, penyebab utama dari kemiskinan adalah kepemilikan pribadi serta monopoli yang dilakukan oleh individu atas tanah. Pandangan George ini muncul, ketika kepemilikan tanah telah menjadi alat ukur untuk melihat kekayaan pribadi seorang individu. Karl Marx juga berpendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah eksploitasi yang terjadi kepada para kaum pekerja yang dilakukan oleh kaum kapitalisme. Sedangkan Robert Malthus mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah karena jumlah penduduk yang cenderung lebih meningkat menurut deret ukur, namun produksi bahan makanan hanya meningkat menurut deret hitung.

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Menurut (Suryanti: 2004) kemiskinan memiliki 4 bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi kemiskinan di antaranya: Pendidikan, pendapatan, lokasi, kondisi sosial budaya, keterbatasan akses di antaranya akses Kesehatan, keuangan, dan pelayanan publik lainnya.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM membahas penduduk pada suatu wilayah memiliki kesempatan memperoleh hasil pembangunan dari haknya untuk mendapatkan pendidikan, pendapatan, kesehatan. Selain itu IPM juga digunakan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk dalam kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Hal tersebut menjadi tolak ukur mengetahui pengaruh kebijakan ekonomi pada suatu negara. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan di publikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu:

- Umur harapan hidup saat lahir
- Harapan lama sekolah
- Rata-rata lama sekolah
- Pengeluaran per kapita

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

- Dimensi Umur Panjang dan Sehat
- Dimensi Pengetahuan
- Dimensi Kehidupan yang Layak

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan Masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil Pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana Pembangunan

selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termasuk swasta (Badan Pusat Statistik, 2008).

PDRB per Kapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per Kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di masa yang akan datang. PDRB per Kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan per kapita, sehingga setiap peningkatan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi (Badan Pusat Statistik & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2020).

PDRB per kapita merupakan indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yang lebih baik, PDRB per kapita juga menggambarkan tingkat kemakmuran (*wealth*), daya beli (*purchasing power parity*), dan kemampuan Pembangunan suatu daerah. Angka pendapatan per kapita didapatkan melalui pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB dan PDRB dalam statistik BPS yaitu:

- Pendekatan Produksi
- Pendekatan Pendapatan
- Pendekatan Pengeluaran

4. Upah Minimum

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh yang dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Komponen penghasilan upah

- a. Upah pokok, yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Tunjangan tetap, yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan dan lain-lain.
- c. Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transportasi atau tunjangan makan.

Upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara

bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa jenis Upah minimum sebagai berikut:

- a. Upah minimum sub sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu;
- b. Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu;
- c. Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tingkat kepercayaan 95%, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa barat.
4. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel IPM, PDRB dan UMK terhadap tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). Berita Resmi Statistik "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 872.
- Case Karl E, R. C. (2010). Prinsip-prinsip Ekonomi Makro Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Cassandra. (2016). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia". Bogor : IPB.
- Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU N0 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h.

- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 79-91.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG*.
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 5.
- Marlita, E. (2017). Analisis Faktor yang Memengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Prasetyoningrum, A. Kristin. (2018). "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia". Semarang : UIN Walisanga Semarang.
- Safuridar, Natasya I.P. (2019). Pengaruh IPM, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur. Aceh: Universitas Samudra.
- Sangadah, S. K., Laut, L. T., & Jalunggono, G. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018. *Dinamic*, 2(1), 229-243.
- Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Jawa Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, ISSN, 1412-6184.
- Syuhada, M. I. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa (Bachelor's Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).
- Wulandari, S., Dasopang, AP, Rawani, GA, Hasfizetty, I., Sofian, MY, Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 2 (10), 3209- 3218.